



## Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Sampang

**Rizal Rohdianto**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

**Rachmawati Novaria**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

**Adi Soesiantoro**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Corresponding author: [rrohdianto17@gmail.com](mailto:rrohdianto17@gmail.com)

**Abstract:** *This research examines the implementation of waste management policies in Sampang Regency using Edward III's policy implementation theory. The research method used is descriptive qualitative with data collection through observation, interviews and documentation. The research results show that the implementation of waste management policies in Sampang Regency has not been optimal. Analysis based on Edward III's four indicators which reveal Communication, Resources, Bureaucratic Structure and Disposition. This research hopes to increase facility assistance, human resource training and coordination between parties to optimize waste management in Sampang Regency.*

**Keywords:** *Policy Implementation, Management, Environment*

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Sampang menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Sampang belum berjalan optimal. Analisis berdasarkan empat indikator Edward III yang mengungkapkan tentang Komunikasi, Sumber Daya, Struktur Birokrasi dan Disposisi Penelitian ini mengharapkan peningkatan bantuan fasilitas, pelatihan sumber daya manusia, dan koordinasi antar pihak untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah di Kabupaten Sampang.

**Kata kunci:** Implementasi Kebijakan, Pengelolaan, Lingkungan

### LATAR BELAKANG

Permasalahan lingkungan hidup saat ini sangatlah kompleks, lingkungan hidup saat ini sangat bergantung pada gaya hidup masyarakat, dan penurunan kualitas dan kuantitas hal-hal yang menunjang kualitas hidup masyarakat menjadi semakin problematis. Kondisi lingkungan semakin buruk akibat pertumbuhan penduduk dan sikap apatis pemerintah daerah. Saat ini, masyarakat sepertinya sudah tidak lagi memperhatikan sampah dalam kehidupan sehari-hari. Namun sampah juga mempunyai dampak buruk atau negatif. Kerusakan lingkungan adalah salah satu contohnya. Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang besar dan laju pertumbuhan yang tinggi, sehingga jumlah sampah yang dihasilkan pun semakin meningkat. Perilaku konsumsi masyarakat juga menghasilkan berbagai jenis sampah, termasuk kemasan. Bahan ilmiah terdegradasi secara signifikan dalam jangka waktu yang lama selama proses penghancuran.

Received: Mei 31, 2024; Accepted: Juni 26, 2024; Published: September 30, 2024

\* Rizal Rohdianto, [rrohdianto17@gmail.com](mailto:rrohdianto17@gmail.com)

Namun hingga saat ini, situasi pengelolaan sampah di tanah air pada tahap pengolahan sampah belum optimal sehingga sampah dari TPS tidak diolah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan langsung dibuang ke tempat pengolahan akhir. sistem 3R. Dilatarbelakangi oleh pemerintah pusat yang memperluas pembangunan tempat pengolahan akhir (TPA) di seluruh wilayah yang belum ramah lingkungan, yakni dari TPA dengan sistem open landfill hingga yang memiliki sistem saniter landfill diperluas hingga mencakup TPA. Dalam penerapan TPA, pengelola ingin bersaing sesuai standar operasional prosedur (SOP).

Pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah tertuang dala Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 (Sampang, 2018) yang memberikan kerangka hukum dan panduan operasional untuk pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan dengan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui program pemilahan sampah ditingkat rumah tangga, serta mengintegrasikan upaya pengelolaan sampah dengan pendidikan dan sosialisasi lingkungan. Selain itu peraturan ini juga mengatur tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait pengelolaan sampah, mendorong pengurangan volume sampah yang dibuang ke TPA, serta meningkatkan kegiatan daur ulang dan pengomposan. Dengan adanya regulasi ini sebagai upaya mewujudkan lingkungan yang lebih bersih.

Dinas Lingkungan Hidup yang fokus pada pengelolaan sampah di kawasan Sampan masih menghadapi banyak kendala dalam melaksanakan pengelolaan sampah. Pertama, hambatan sarana dan prasarana proses pengumpulan sampah dari sumber sampah hingga tempat pengumpulan adalah jumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang dibangun masih kurang. Mengingat timbulan sampah yang ada, Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) belum sepenuhnya beroperasi karena belum jelasnya misi dan fungsi teknisnya dengan bank sampah. Akibatnya, pengurus kelompok masyarakat yang ditunjuk tidak berfungsi maksimal.

Seperti yang diharapkan. Sementara itu, kendala dalam partisipasi masyarakat adalah masyarakat belum mengetahui bahwa langkah terbesar dalam menangani sampah rumah tangga adalah penerapan konsep 3R – reuse, kurangi, dan daur ulang sedemikian rupa sehingga barang-barang yang tercampur secara acak dapat direduksi menjadi sampah dan diubah menjadi barang-barang yang berguna baik bentuk maupun fungsinya, sehingga barang-barang/sampah tersebut dapat digunakan kembali tanpa pemisahan. Faktanya, pengelolaan sampah di tingkat nasional telah banyak dipelajari dalam beberapa penelitian. Studi ini menyelidiki dampak layanan pengumpulan dan pengolahan sampah modern terhadap penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pemilahan sampah (Elamin et al., 2016).

Bidang koin acak - metode eksperimental diukur di provinsi Yogyakarta. Penelitian terbaru berfokus pada pengelolaan sampah di tingkat nasional. Salah satu contohnya adalah penelitian yang dilakukan secara sukarela di Yogyakarta yang menyelidiki metode pengelolaan sampah skala rumah tangga yang tidak menghasilkan sampah (Widiarti, 2012).

Kabupaten Sampang merupakan salah satu daerah yang mendapat hibah dari pemerintah pusat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PUPR) untuk membangun TPA dengan sistem sanitasi Renville. TPA mendapat pujian yang tinggi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas pelaksanaan kegiatannya (Abdul, 2019). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan pada beberapa penelitian di atas, penelitian ini fokus pada proses implementasi kebijakan pengolahan sampah di Kabupaten Sampang. Untuk mengkaji implementasi kebijakan, penelitian ini menggunakan teori Edward III (1980) menyoroti empat aspek yang mempunyai dampak besar terhadap implementasi kebijakan: komunikasi sebagai alat analisis, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul “*Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Sampang*”.

## **KAJIAN TEORITIS**

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu proses kebijakan publik dan merupakan bagian paling penting, sebaik apapun proses kebijakan tersebut disusun, diagendakan dan diformulasikan akan kurang berarti tanpa proses implementasi. Implementasi kebijakan publik adalah bagian paling krusial, bersifat krusial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakannya tidak bisa diwujudkan.

Dalam proses pengambilan kebijakan, evaluasi ini berguna untuk pengambilan kebijakan karena memberikan wawasan yang sebanding dengan kebijakan mengenai perbedaan antara kinerja kebijakan yang diharapkan dan apa yang sebenarnya dicapai. Analisis tidak hanya menentukan seberapa jauh masalah yang terjadi telah diselesaikan, tetapi juga menjelaskan dan mengkritik prinsip-prinsip yang membentuk kebijakan,

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian dimulai dengan observasi objek yang diteliti dengan menggunakan hasil observasi landasan teori yang telah diperoleh untuk mengidentifikasi dan menganalisis hasil yang diperoleh. Sumber data yang digunakan yaitu data primer data yang didapat melalui observasi

wawancara serta dokumentasi. Metode penelitian ini dengan cara mengumpulkan dan menganalisis hasil wawancara secara lisan maupun tertulis secara langsung oleh beberapa informan yang terlibat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bedasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan menggunakan teori Edward III 1980 (Mulyono, 2009) tentang Implementasi Kebijakan sebagai berikut:

### **1) Komunikasi**

Indikator pertama menjelaskan tentang Komunikasi merupakan aspek penting dalam mengomunikasikan kebijakan kepada lembaga publik dan memperoleh tanggapan dari pihak-pihak yang terlibat. Sebuah kebijakan perlu dikomunikasikan secara akurat, baik kepada pihak pelaksana maupun kelompok sasaran, agar mereka memahami sepenuhnya cara pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurut pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang metode yang paling efektif untuk berkoordinasi dengan pengelola TPA di Kabupaten Sampang adalah melalui rapat (offline maupun online), briefing, dan sistem informasi manajemen. Meskipun demikian, terdapat kendala dalam pelaksanaan rapat atau briefing, di mana masih ada beberapa pihak yang berhalangan hadir. Dari perspektif pengelola TPA Kabupaten Sampang, mereka mengakui telah berdiskusi dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup terkait masalah alat yang sering bermasalah atau tidak dapat digunakan secara maksimal. Namun, pengelola TPA menyatakan bahwa tindakan nyata dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang masih kurang, sehingga sering terjadi penumpukan sampah. Secara keseluruhan, perlunya disadari meskipun metode komunikasi seperti rapat dan briefing sudah dilakukan, masih terdapat kendala dalam implementasinya, serta kurangnya tindak lanjut dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh pengelola TPA, seperti masalah alat yang sering bermasalah dan penumpukan sampah.

### **2) Sumber Daya**

Indikator kedua menjelaskan tentang sumber daya berdasarkan informasi yang diberikan, Terkait strategi khusus untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya dalam kegiatan pengelolaan sampah, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang mengakui bahwa mereka belum memiliki strategi khusus untuk itu. Namun, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang menyatakan bahwa mereka akan segera membentuk strategi khusus agar dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya dalam pengelolaan sampah. Sementara itu, dari sisi pengelola TPA Kabupaten Sampang, mereka

memiliki program daur ulang untuk sampah organik dengan mengolahnya menjadi pupuk. Akan tetapi, untuk sampah non-organik, pengelola TPA Kabupaten Sampang mengakui bahwa mereka belum memiliki program daur ulang. Meskipun belum ada strategi khusus dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang untuk memaksimalkan sumber daya dalam pengelolaan sampah, mereka berencana untuk segera menyusun strategi tersebut. Sementara itu, pengelola TPA Kabupaten Sampang telah memiliki program daur ulang untuk sampah organik, namun belum untuk sampah non-organik. Hal ini menunjukkan adanya peluang untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya, terutama dalam pengelolaan sampah non-organik.

### 3) Struktur Birokrasi

Indikator ke tiga menjelaskan tentang struktur birokrasi Berdasarkan informasi yang diberikan, mengenai struktur birokrasi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sampang: Menurut pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang, struktur birokrasi dalam pengelolaan sampah melibatkan beberapa pihak seperti pemerintahan, organisasi, dan masyarakat yang bekerja sama untuk memastikan pengelolaan yang efektif dan efisien. Namun, berdasarkan wawancara dengan pengelola TPA Kabupaten Sampang, terungkap bahwa penumpukan sampah terjadi karena kurangnya fasilitas atau alat pengelola sampah dan sering terjadi masalah pada alat-alat tersebut. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pernyataan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang tentang pengelolaan yang efektif dan efisien dengan kenyataan di lapangan yang dihadapi oleh pengelola TPA. Lebih lanjut, dari perspektif masyarakat sekitar TPA Kabupaten Sampang (IS dan SW), mereka berpendapat bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang belum melakukan proses pengelolaan sampah sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku. Masyarakat menyebutkan bahwa masih terdapat banyak kendala dalam proses pengelolaan sampah, serta masih terjadi penumpukan sampah. Meskipun pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang mengklaim bahwa struktur birokrasi dalam pengelolaan sampah melibatkan berbagai pihak untuk menjamin efektivitas dan efisiensi, namun pada kenyataannya masih terdapat kendala seperti kurangnya fasilitas dan sering terjadi masalah pada alat-alat pengelola sampah, serta penumpukan sampah yang menunjukkan bahwa pengelolaan belum sepenuhnya sesuai dengan SOP. Hal ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara struktur birokrasi yang ada dengan implementasi di lapangan.

#### 4) Disposisi

Indikator ke empat menjelaskan tentang informasi yang diberikan, terkait faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sampang. Menurut pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang, terdapat beberapa faktor penghambat dalam pengelolaan sampah, antara lain: Keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, Kurangnya koordinasi serta infrastruktur yang kurang memadai. Hal ini menyebabkan proses pengelolaan sampah kurang efektif dan efisien, serta terjadi penumpukan sampah. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang komprehensif dari berbagai pihak, meliputi peningkatan anggaran, perbaikan infrastruktur dan fasilitas, peningkatan koordinasi antar lembaga, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta mengadopsi teknologi dan inovasi baru dalam pengelolaan sampah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh oleh peneliti saat meneliti Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sampang dengan menggunakan teori Edward III yang mempunyai empat indikator yaitu meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Struktur Birokrasi, Disposisi indikator ini dianggap sebagai tolak ukur dalam Implementasi Kebijakan dalam pengelolaan sampah. Dari empat indikator ini dapat disimpulkan bahwa dari setiap indikator teori Edward III sudah dijalankan meskipun hasilnya belum maksimal.

- a) Dalam Komunikasi antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang dengan desa dan kelompok masyarakat tidak konsisten dan kurang optimal, sehingga terjadi pendekatan yang tidak merata sehingga mengakibatkan tindakan pengurangan sampah yang dilakukan ke desa dan warga tidak terkomunikasikan dengan baik.
- b) Temuan penelitian yang ada menunjukkan bahwa sumber daya merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan pelaksanaan program yang kurang optimal. Khususnya di tingkat desa, rendahnya kapasitas pelaksana dalam melaksanakan program dan kurangnya infrastruktur telah mengakibatkan penundaan dan stagnasi dalam pelaksanaan program.
- c) Dalam struktur birokrasi, masing-masing pihak selama ini menjalankan tugas sesuai kewenangan yang diberikan. Aturan mengenai koordinasi dan komunikasi sudah jelas dan kedua fungsi tersebut dijalankan dengan sangat baik. Berhati-hatilah untuk menghindari kebingungan di antara pihak-pihak yang melaksanakan.

d) Disposisi, berdasarkan evaluasi terhadap program pengelolaan sampah yang ada, ditemukan berbagai hambatan yang signifikan sehingga sering terjadinya penumpukan sampah. Diharapkan pengelolaan sampah dapat di tingkatkan secara signifikan melalui peningkatan infrastruktur, partisipasi masyarakat, serta koordinasi yang lebih baik.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang ada terhadap Implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Sampang. Saran yang dapat diberikan peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Dinas harus memberikan bantuan tambahan kepada Desa untuk meningkatkan fasilitas pendukung dalam pengurangan sampah. Seperti memperbanyak alat pengangkutan, memberikan pelatihan rutin kepada Bank Sampah dalam pemanfaatan sampah. Karena pada pembahasan faktor Sumber Daya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program.
2. Perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia lanjutan kepada pelaksana program. Bila perlu pada tiap desa diberikan pendamping ahli guna sarana monitoring. Sehingga tak hanya dilakukan oleh Dinas sendiri.
3. Memberikan fasilitas yang memadahi kepada pihak pengelola agar proses pengelolaan sampah berjalan dengan optimal.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur saya haturkan kehadiran Allah SWT, yang selalu melimpahkan kemudahan dan menyertai di setiap proses pelaksanaan skripsi ini sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan rangkaian skripsi dengan baik dan lancar. Dalam penyusunan artikel ini, tentu saja terdapat bimbingan, masukan maupun kritik dari berbagai pihak. Oleh karena itu saya sebagai penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Ibu Rachmawati Novaria selaku Dosen Pembimbing pertama.
2. Bapak Adi Soesiantoro selaku Dosen Pembimbing kedua yang telah membimbing saya dalam proses penyelesaian skripsi.
3. Informan-informan yang terlibat pada penelitian.
4. Diri saya sendiri yang dapat menyelesaikan rangkain penelitian skripsi dengan baik dan maksimal.

## DAFTAR REFERENSI

Abdul, B. (2019). Radar Madura .id.  
<https://radarmadura.jawapos.com/bangkalan/amp/74895950/belum-punya-tpa-sanitary-renville>

Elamin, M. Z., et al. (2016). Analysis Of Waste Management In The Village Of Disanah , District Of Sreseh. 368–375.

Mulyono. (2009). GEORGE EDWARD III.  
<https://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/28/model-implementasi-kebijakan-george-edward-iii/>

Peraturan Bupati Sampang. (2018). PROVINSI JAWA TIMUR.

Widiarti, I. W. (2012). Pengelolaan Sampah Berbasis “ Zero Waste ” Skala Rumah Tangga Secara Mandiri. 4, 101–113.